

EVALUASI PROLEGNAS
RUU PRIORITAS TAHUN 2025
Per 27 MEI 2025

I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH
(PEMBICARAAN TINGKAT I)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR (KOMISI VII)	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> - Surpres No R-41/Pres/09/2024 tgl 5 Sept 2024 - Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 9 September 2024 MP I 2024-2025 dibahas oleh Komisi X <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> - Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi VII RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi VII
2	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> - Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 19 Sept 2022 MP I 2022-2023 dibahas oleh Komisi VII <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> - Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi XII RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi XII
3	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> - Surat Presiden No: R-02/Pres/01/2024 tgl 22 Januari 2024 - Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 20 Agustus 2024 MP I 2024-2025 dibahas oleh Baleg - RUU sudah selesai proses Pembicaraan TK I di Badan Legislasi tanggal 21 Agustus 2024 - Telah dijadwalkan Rapat Paripurna, namun masih ditunda <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> - Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Badan Legislasi RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Badan Legislasi
4	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> - Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021 - Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 26 Agustus 2021 MP I 2021-2022 dibahas oleh Komisi III <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> - Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi III RUU dalam proses Pembicaraan Tk I di

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
5	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Komisi III <i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tgl 14 Januari 2022 • Tgl 3 Feb 2022 MP III 2021-2022 dibahas oleh Komisi III <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Komisi III RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III
6	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i> <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/04/2024. Tgl 3 April 2024 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 27 Mei 2024 MP V 2023-2024 dibahas oleh Pansus <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, dibahas oleh Pansus • Penetapan keanggotaan Pansus dlm Parpur tgl 6 Maret 2025 RUU dalam proses Pembicaraan Tk. I di Pansus
7	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/ANGGOTA	<i>Operan (Carry Over)</i> RUU Kumulatif Terbuka <i>Periode Keanggotaan 2019-2024</i> • Surpres Tgl 28 Nov 2022 Nomor : R-61/Pres/11/2022 <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rakonsul Bamus tgl 22 Jan 2025 MP II 2024-2025, ditugaskan Komisi III utk menindaklanjuti keputusan Bamus tgl 26 September 2024 Catatan: RUU ini diagendakan dalam Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan pada Rapur di masa Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029 (keputusan Rakonsul Bamus tgl 26 September 2024) Menunggu Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan
8	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka <i>Periode Keanggotaan 2024-2029</i> • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 18 Maret 2025 MP II 2024-2025 dibahas oleh Komisi I RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimitation of the Exculsive Economic zone Boundary)		

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <i>(judul RUU hasil penyusunan : RUU tentang Hukum Acara Pidana (HAP))</i>	DPR (KOMISI III)	- Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 18 Februari 2025 <i>Surpres No R-19/Pres/03/2025 tgl 19 Maret 2025</i> Menunggu Penugasan Bamus
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	- Selesai Penyusunan di Baleg 17 Maret 2025 - Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 20 Maret 2025 <i>Surpres No R-20/Pres/04/2025 tgl 8 April 2025</i> Menunggu Penugasan Bamus
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo Di Provinsi Gorontalo (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka - Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 - Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo Di Provinsi Gorontalo (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka - Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 - Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka - Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 - Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka - Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 - Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka Di Provinsi	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	(KOMISI II)	2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara (Kumulatif Terbuka)	DPR (KOMISI II)	RUU Kumulatif Terbuka • Selesai Harmonisasi di Baleg tgl 5 Maret 2025 • Diusulkan menjadi RUU Usul DPR dalam Rapur tgl 20 Maret 2025 Menunggu Surpres

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	• Surat Pimpinan Komisi VIII No: B/6936/LG.01.01/5/2025 tgl 20 Mei 2025 • Proses Harmonisasi di Badan Legislasi

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	Proses Penyusunan
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (KOMISI II)	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	
4.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	Proses Penyusunan
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	Proses Penyusunan
9.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	Proses Penyusunan
11.	RUU tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	DPR (KOMISI XI)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
12.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	Proses Penyusunan
13.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR (BADAN LEGISLASI)	
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	
15.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	
16.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
17.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	
18.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR (BADAN LEGISLASI)	
19.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
20.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (BADAN LEGISLASI)	
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN	Selesai penyusunan di Baleg Tgl 30 April 2025 Menunggu Rapat Paripurna utk

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
		LEGISLASI)	disetujui menjadi RUU Usul DPR
22.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR (BADAN LEGISLASI)	
23.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	
25.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
26.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
27.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	DPR (BADAN LEGISLASI)	RUU Kumulatif Terbuka Selesai penyusunan di Baleg Tgl 24 Maret 2025 Menunggu Rapat Paripurna utk disetujui menjadi RUU Usul DPR

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH (5 RUU)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
2.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
3.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
4.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR / KOMISI VI	Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-12 DPR RI MS II, TS 2024-2025 tgl 4 Februari 2025
2.	RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR / BALEG	<i>Kumulatif Terbuka (Akibat Putusan MK)</i> Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-13 DPR RI MS II, TS 2024-2025 tgl 18 Februari 2025

Per 27 Mei 2025

3.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR / KOMISI I	Disetujui sbg UU dlm Rapat Paripurna ke-15 DPR RI MS II, TS 2024-2025 tgl 20 Maret 2025
----	---	-------------------	---

Jakarta, 27 Mei 2025
Set. Badan Legislasi DPR RI